

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

*Japan's New Security Bills* merupakan reinterpretasi pada pasal sembilan konstitusi Jepang yang mendapat respon negatif dari pemerintah Korea Selatan. Secara umum *Japan's New Security Bills* akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, responsif untuk perencanaan pada spektrum yang lebih luas termasuk kemampuan untuk melakukan praktik *collective self-defense*. Pemerintah Korea Selatan secara terus menerus meminta transparansi militer Jepang apabila Jepang melakukan *collective self-defense* di wilayah Semenanjung Korea. Serta tidak akan mentolerir berbagai praktik militer Jepang di wilayah Semenanjung Korea apabila Jepang melakukannya tanpa seizin pemerintah Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan mengkhawatirkan berbagai implikasi yang berpotensi terjadi terhadap hubungan bilateral kedua negara. Dengan kondisi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang masih berada dalam bayangan masa lalu, pemerintah Korea Selatan mengkhawatirkan Undang-undang keamanan Jepang yang baru akan berpengaruh pada kerjasama bilateral kedua negara khususnya kerjasama ekonomi karena disebabkan oleh tingginya rasa tidak percaya antara kedua negara yang secara otomatis akan menghambat berbagai kerjasama yang dilakukan. Ingatan masa imperialisme Jepang pada tahun 1910 hingga tahun 1945 di Semenanjung Korea masih meninggalkan trauma mendalam untuk masyarakat Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan menganggap bahwa pemberlakuan *Japan's New Security Bills* merupakan potensi perang.

Selain mempertimbangkan implikasi terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan dan memperhatikan emosi masyarakat Korea Selatan, terdapat alasan lain yang secara signifikan mempengaruhi keputusan pemerintah Korea Selatan untuk merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Mempertimbangkan kepentingan nasional Korea Selatan yakni untuk melindungi kemerdekaan yang telah diraih pasca imperialisme Jepang, juga menjaga keutuhan wilayah, keamanan nasional hingga kesejahteraan masyarakat Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan mengambil keputusan kebijakan luar negeri dengan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri pemerintah Korea Selatan selain dipengaruhi kepentingan nasional negara juga dipengaruhi empat faktor yang dipertimbangkan ketika pemerintah mengambil keputusan kebijakan luar negeri. Diantaranya faktor kondisi politik domestik, aktor pengambil keputusan, kondisi kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

Kondisi politik domestik Korea Selatan menjadi alasan pertama Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye menjadi masa pemerintahan yang dapat dikatakan berperan “banyak” menjadikan kondisi politik domestik Korea Selatan tidak stabil. Instabilitas tersebut disebabkan oleh banyak terjadinya skandal politik. Selain itu kondisi kemampuan ekonomi dan militer Korea Selatan yang masih dibawah Jepang juga ikut mempengaruhi. Korea Selatan mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2014 dan terus berlanjut hingga tahun 2015. Berbeda dengan Jepang yang mengalami perbaikan ekonomi. Banyak analisis ekonomi berpendapat bahwa situasi ekonomi Korea Selatan mirip dengan yang

dialami Jepang sesaat sebelum masuk ke lesunya ekonomi Jepang yang cukup berkepanjangan pada tahun 1990-an. Jepang tidak bisa mengabaikan kemerosotan ekonomi Korea Selatan karena Korea Selatan merupakan tujuan terbesar ketiga dari ekspor Jepang. Untuk itu kerjasama ekonomi baik dalam tindakan riil maupun berupa *shared value* ataupun *experience* sangatlah diperlukan Korea Selatan dan Jepang. Beralih pada kemampuan militer, fakta bahwa kekuatan militer Jepang berada di peringkat atas, sangat wajar apabila Korea Selatan mengkhawatirkan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* dapat mengganggu keamanan nasional Korea Selatan dan stabilitas keamanan wilayah regional Asia Timur. Karena dengan *Japan's New Security Bills*, Jepang berpotensi melakukan praktik militernya di wilayah Semenanjung Korea dengan dalih membantu menyelesaikan konflik dan menjaga keamanan regional meskipun tidak ada izin dari pemerintah Korea Selatan. Terakhir dari sisi konteks internasional, imperialisme Jepang di Semenanjung Korea berbuntut pada saling mengklaim wilayah Pulau Dokdo/Takeshima. Perlindungan wilayah teritorial menjadi salah satu kepentingan nasional Korea Selatan, dengan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* Korea Selatan mengkhawatirkan Undang-undang tersebut berpengaruh pada agresifitas militer Jepang untuk mengklaim Pulau Dokdo/Takeshima.

Alasan-alasan diatas menjadi faktor pendorong Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Korea Selatan bagaimanapun diharuskan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional maupun regional Asia Timur, yaitu dengan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*.